

**ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TIDAK DITETAPKANYA TINDAK
PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PADA UU NO. 18 TAHUN
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN**



Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Yang
Berguna Untuk Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

Didik Cahyono

NIM: C100 140 330

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TIDAK DITETAPKANYA TINDAK
PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PADA UU NO. 18 TAHUN
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN**

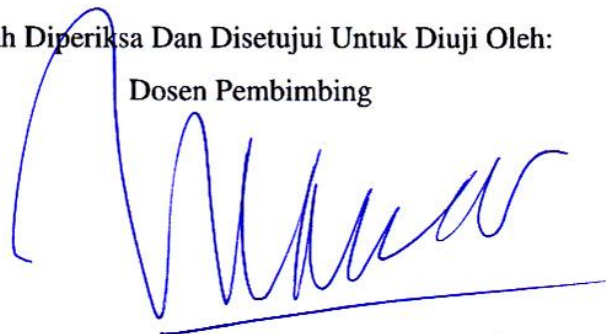
Oleh:

DIDIK CAHYONO

NIM: C100 140 330

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji Oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sudaryono', is written over a horizontal line.

(Sudaryono, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TIDAK DITETAPKANYA TINDAK
PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PADA UU NO. 18 TAHUN
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN**

Oleh:

DIDIK CAHYONO

C100 140 330

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

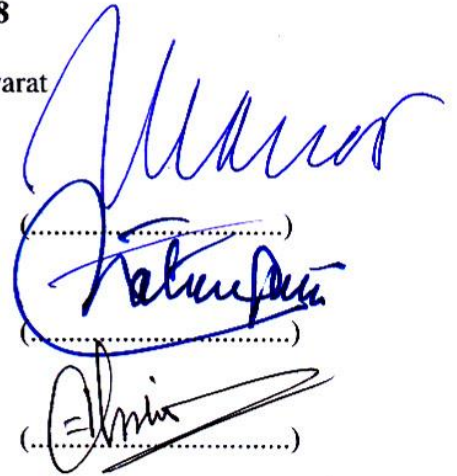
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari: **Kamis, 04 Oktober 2018**

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Dewan Penguji:

1. **Sudaryono, S.H., M.Hum.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Natangsa Surbakti. S.H., M.Hum.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Hartanto, S.H., M.H.**
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didik Cahyono

NIM : C100 140 330


Alamat : Dk. Ngringin RT/RW 20/07 Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro,
Kabupaten Karanganyar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Surakarta, 04 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



Didik Cahyono

NIM: C100 140 330

MOTTO

Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum, Sehingga Mereka Mengubah Keadaan Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri

Qs. Ar Ra'd 11

Boleh Jadi Kamu Membenci Sesuatu, Padahal Itu Amat Baik Bagimu, Dan Boleh Jadi Pula Kamu Menyukai Sesuatu, Padahal Itu Amat Buruk Bagimu: Allah Maha Mengetahui, Sedangkan Kamu Tidak Mengetahui

Qs. Al Baqarah 216

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Alm. Ibu saya Darni, yang telah membesarkan saya dan menuntut saya sampai jenjang kehidupan saat ini terimakasih ibu.
2. Ayah dan Ibu saya, pahlawan yang tercinta terimakasih atas doa dan dukungan kalian.
3. Saudara saya kakak dan adik tercinta yang selalu memberikan semangat.
4. Seluruh keluarga besar saya terimakasih atas semangat dan motivasinya selama ini
5. Teman-teman yang saya banggakan yang menemani perjuangan menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implikasi Yuridis Tidak Ditetapkannya Tindak Pidana Kejahatan Dan Pelanggaran Pada UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”

. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca mengenai Implikasi Yuridis Tidak Ditetapkannya Tindak Pidana Kejahatan Dan Pelanggaran. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar kedepannya dapat memperbaiki atau menyempurnakan isi tulisan ini agar menjadi lebih baik lagi. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak dan terkhusus kepada:

1. Ayah dan ibu dan saudaraku tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan serta dukungan moril dan materil yang tak terhingga.
2. Bapak Sudaryono, SH., M.Hum yang sabar membimbing penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan.
5. Seluruh staff dan karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dengan memberikan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan.
6. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dan membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Surakarta, 04 Oktober 2018

Didik Cahyono

**ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS TIDAK DITETAPKANYA TINDAK
PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PADA UU NO.18 TAHUN
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN**

Didik Cahyono

C.100.140.330

Email: didikcahyo17@gmail.com

Abstrak

Penentuan tindak pidana dalam sebuah undang- undang pidana khusus menjadi perhatian khusus bagi penulis, ini dikarenakan dalam realitanya banyak undang-undang pidana khusus yang tidak mengatur pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran seperti yang terjadi dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkan dalam KUHP yang saat ini menjadi induk peraturan pidana di Indonesia tetap membedakan dua jenis tindak pidana tersebut sebagai ketentuan umumnya. Walaupun pada dasarnya Undang- undang pidana khusus memiliki wewenang untuk menyimpang dari aturan umum tersebut. Namun ketika sebuah undang-undang pidana khusus yang tidak mengatur ketentuan umum mengenai suatu tindak pidana maka ketentuan umum dalam KUHP dapat diberlakukan lantas bagaimana jika undang- undang pidana khusus yang tidak mengatur pembedaan dua jenis tindak pidana tersebut dapat menerapkan kembali ketentuan umum dalam KUHP tentunya hal ini akan menimbulkan implikasi yuridis baik secara materil yang berkaitan dengan KUHP dan secara formil yang berkaitan dengan KUHP

Kata kunci: Tindak Pidana, Kejahatan, Pelanggaran, Implikasi Yuridis

Abstract

Determination of criminal acts in a special criminal law is of particular concern to the author, this is because in reality many special criminal laws that do not regulate the distinction between crime and violation as happened in Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, while in the Criminal Code which is currently the main criminal code in Indonesia, it still distinguishes the two types of criminal acts as general provisions. Although basically the special criminal law has the authority to deviate from these general rules. However, when a special criminal law which does not regulate general provisions concerning a crime to eat general provisions in the Criminal Code can be applied then what if the special criminal law which does not regulate the two types of crimes can reapply the general provisions in the Criminal Code, of course this will cause materially good juridical implications relating to the Criminal Code and formally relating to the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Crime, Crime, Violation, Juridical Implication*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKS.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis Tindak Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana	21

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana	21
2. Macam-Macam Penanggulangan Tindak Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum Mengenai UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan	23
1. Latar Belakang Dibentuknya UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan	23
2. Penyusunan UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realita Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan	27
B. Implikasi Yuridis Akibat Tidak Adanya Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ...	28
1. Implikasi Yuridis Yang Bersifat Materil	28
2. Implikasi Yuridis Yang Bersifat Formil	42
C. Keterkaitan Implikasi Yuridis Tidak Ditetapkannya Tindak Pidana Kejahatan Dan Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU KUHP	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA